

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selama ini, keberhasilan pembangunan lebih banyak diukur melalui indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Namun, indikator tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Stiglitz et al., 2009). Hal ini disebabkan karena indikator ekonomi hanya menilai kondisi material yang bersifat objektif dan berbasis moneter. Oleh karena itu, pengukuran kesejahteraan tidak seharusnya hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga perlu mempertimbangkan kesejahteraan subjektif yang berkaitan dengan bagaimana individu merasakan dan menilai kehidupannya sebagai bagian dari proses pembangunan (OECD, 2013).

Kesejahteraan subjektif dapat diukur melalui indeks kebahagiaan sebagai indikator dalam menilai kualitas hidup masyarakat (O'Neill, 2008). Indeks kebahagiaan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan bagaimana individu merasakan dan menilai kualitas hidupnya yang dijalannya (OECD, 2011). Dalam kajian kesejahteraan subjektif, kebahagiaan dipahami melalui beberapa dimensi utama, menurut Diener (2000) kesejahteraan subjektif mencakup kepuasan hidup dan perasaan, sedangkan

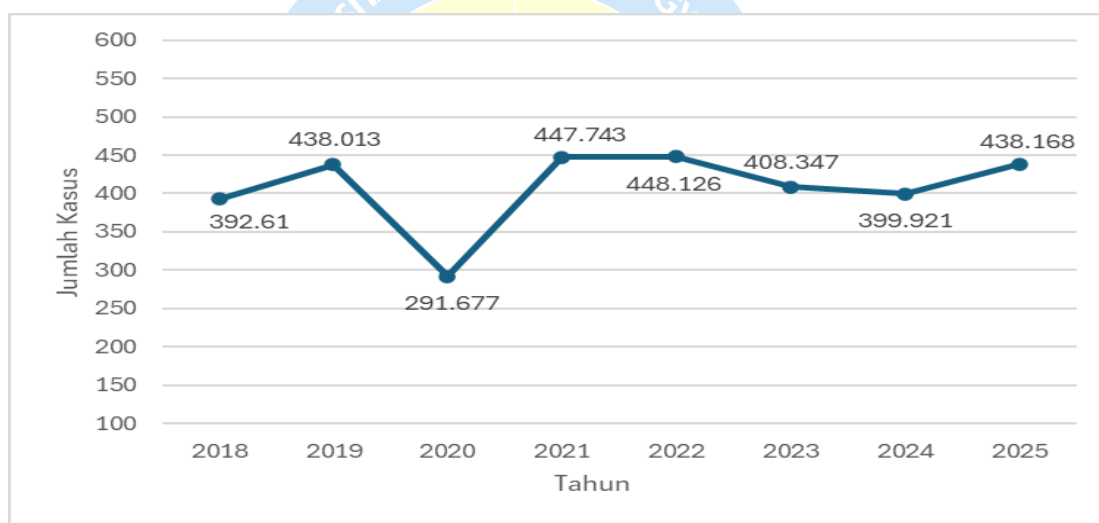
Ryff (1989) menambahkan dimensi makna hidup. Dengan demikian, kebahagiaan diukur melalui tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup. Salah satu dimensi utama dalam pengukuran tersebut adalah kepuasan hidup yang menggambarkan penilaian individu terhadap berbagai aspek kehidupan. Dimensi kepuasan hidup dibagi menjadi dua subdimensi, yaitu kepuasan hidup personal dan kepuasan hidup sosial. Kepuasan hidup sosial mencerminkan kualitas hubungan individu dengan lingkungan sosial, termasuk dalam lingkup keluarga (BPS, 2017).

Kepuasan hidup sosial dalam lingkup keluarga tercermin dalam keharmonisan keluarga sebagai bentuk kualitas hubungan antaranggota keluarga yang merupakan bagian dari kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*). Menurut Gunarsa (dalam Sholihah & Saidiyah, 2020), keharmonisan keluarga merupakan kondisi di mana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan, yang tercermin dari berkurangnya ketegangan dan kekecewaan, serta adanya penerimaan terhadap diri sendiri maupun anggota keluarga lainnya. Keharmonisan keluarga ditandai dengan komunikasi yang baik, kemampuan dalam menyelesaikan konflik, sikap saling menghormati, serta kebersamaan dalam kehidupan keluarga (Fauziah et al., 2021).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2014, 2017 dan 2021 tingkat keharmonisan keluarga di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa periode. Pada tahun 2014, nilai indeks sebesar 78,89, kemudian meningkat menjadi 80,05 pada tahun 2017, dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 82,56. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam

tingkat keharmonisan keluarga sebagai bagian dari kesejahteraan subjektif masyarakat di Indonesia.

Peningkatan tersebut tidak secara langsung menunjukkan bahwa seluruh keluarga di Indonesia berada dalam kondisi yang sepenuhnya harmonis. Berbagai permasalahan seperti konflik rumah tangga, kurangnya komunikasi, hingga perbedaan peran dalam keluarga seringkali menjadi pemicu ketidakharmonisan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025). Salah satu bentuk nyata dari kondisi tersebut adalah meningkatnya kasus perceraian di Indonesia. Gambaran mengenai tren tingkat perkembangan jumlah perceraian di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1

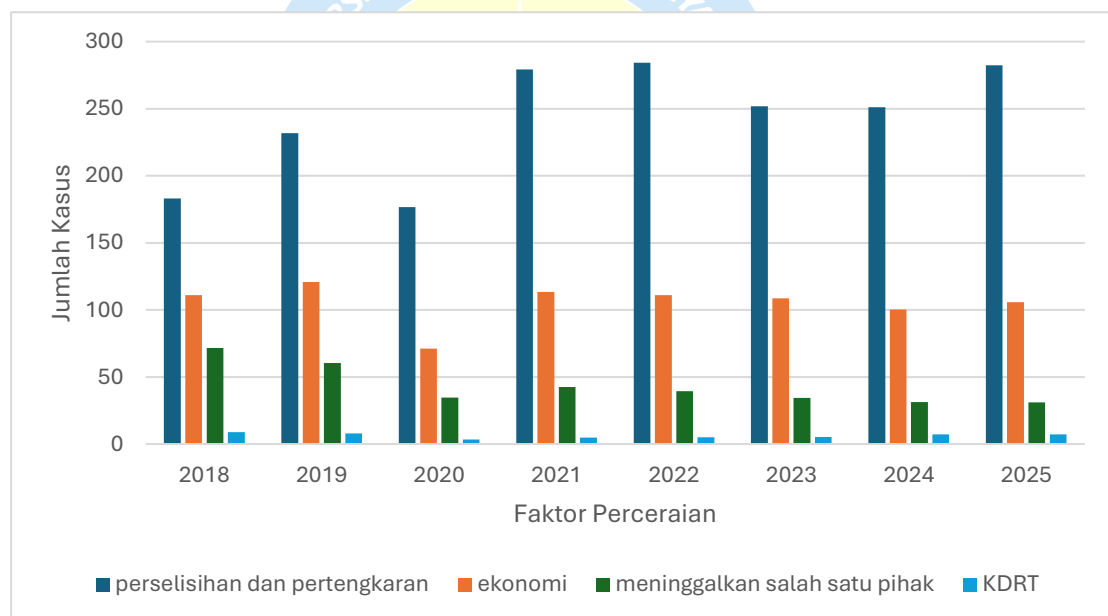


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Kasus Perceraian Indonesia 2018-2025

Berdasarkan Gambar 1.1, data perceraian di tingkat nasional menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah perceraian tercatat sebesar 392.610 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 438.013 kasus. Pada tahun 2020 jumlah perceraian mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 291.677

kasus. Angka perceraian kemudian melonjak cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 447.743 kasus, yang sebagian dipengaruhi oleh kondisi pada masa pandemi COVID-19 peningkatan masih berlanjut pada tahun 2022 dengan total 448.126. Pada tahun 2023 dan 2024 jumlah perceraian mulai menurun. Namun tren penurunan tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun 2025, jumlah perceraian kembali meningkat menjadi 438.168 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi. Kondisi perceraian di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Gambar 1.2 Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia tahun 2018-2025

Berdasarkan Gambar 1.2, data faktor penyebab perceraian di Indonesia pada periode 2018 hingga 2025 menunjukkan pola yang relatif stabil, meskipun terjadi fluktuasi jumlah kasus pada masing-masing faktor dari tahun ke tahun. Perselisihan

dan pertengkaran menjadi penyebab utama dengan jumlah kasus tertinggi setiap tahunnya. Pada tahun 2018 hingga 2019, jumlah kasus mengalami peningkatan, kemudian menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah kasus kembali meningkat dan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa konflik terjadi secara terus-menerus dalam rumah tangga, terutama akibat komunikasi yang kurang efektif dan ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah (Sari, 2025).

Faktor penyebab perceraian tertinggi kedua adalah ekonomi. Jumlah kasus pada faktor ini cenderung stabil, meskipun mengalami fluktuasi dalam beberapa periode. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan finansial masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perceraian. Faktor meninggalkan salah satu pihak dan faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki jumlah kasus yang relatif rendah. Kedua faktor tersebut menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi, tetapi tetap muncul secara konsisten setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan komitmen dan kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi bagian dari faktor yang memengaruhi keharmonisan keluarga (Sari, 2025). Keharmonisan keluarga di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal melalui strategi yang efektif dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis.

Keharmonisan keluarga tidak hanya berkaitan dengan dinamika hubungan dalam rumah tangga, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi kesetaraan gender di suatu wilayah (Puspitawati & Gunawan, 2023). Kesetaraan gender menunjukkan adanya kesempatan, peran, serta akses yang setara antara laki-laki dan perempuan

dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pembangunan maupun keluarga. Dalam konteks keluarga, kesetaraan gender tercermin melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat mendorong terciptanya komunikasi yang saling terbuka, serta pengambilan keputusan secara bersama dalam keluarga, sehingga hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih harmonis. Sebaliknya ketimpangan gender dapat menimbulkan ketidakseimbangan peran dan didominasi oleh salah satu pihak dalam rumah tangga, yang dapat menyebabkan konflik, kekerasan dalam rumah tangga, sehingga berujung pada perceraian (UN Women, 2019). Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi faktor penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga, yang pada akhirnya tidak hanya dirasakan dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga dapat tercermin dalam tingkat keharmonisan keluarga di suatu wilayah.

Tingkat kesetaraan di suatu wilayah dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu indikator yang menunjukkan perbandingan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi (BPS, 2017). Nilai IPG berkisar 0-100, semakin mendekati 100 semakin kecil kesenjangan gender, sehingga peluang laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran di keluarga menjadi lebih setara. Sebaliknya, semakin jauh dari angka 100 mencerminkan masih adanya ketimpangan gender yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan dalam keluarga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai IPG di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 90,34 dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 91,85. Nilai IPG tidak selalu mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahun karena pada beberapa periode

terdapat fluktuasi dalam perkembangannya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Peningkatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan ke-5 yang menekankan pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari pembangunan inklusif (UNDP, 2026). Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga secara lebih baik, sehingga berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan konflik dan perceraian dapat berkurang, yang pada akhirnya mendukung terciptanya keharmonisan keluarga tidak hanya pada tingkat keluarga, tetapi juga tercemin pada tingkat wilayah. Selain indeks pembangunan gender, keharmonisan keluarga juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan yang diukur melalui rata-rata sekolah dan kesejahteraan ekonomi yang diukur melalui pengeluaran per kapita.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, tingkat keharmonisan keluarga dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendidikan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik kemampuan individu dalam berkomunikasi, mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan secara bijaksana dalam kehidupan keluarga, serta dapat memberikan peluang bagi individu untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih stabil, yang dapat menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, tingkat

pendidikan yang lebih baik dapat berperan dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. Sebaliknya tingkat pendidikan yang rendah dapat membatasi kemampuan individu dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga dan juga kurangnya akses dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan konflik yang pada akhirnya menurunkan tingkat keharmonisan keluarga (Aditama, 2020).

Faktor ekonomi juga berdampak terhadap keharmonisan keluarga. Ketika kondisi ekonomi keluarga berada dalam keadaan baik, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan tempat tinggal menjadi lebih terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat memberikan rasa aman dan menciptakan stabilitas dalam keluarga. Kondisi ekonomi yang baik memungkinkan keluarga untuk mengurangi tekanan finansial yang berpotensi menimbulkan konflik. Dengan demikian, hubungan antaranggota keluarga dapat terjalin dengan baik, sehingga mendorong terciptanya keharmonisan dalam keluarga (Wibowo & Lamongan, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel indeks pembangunan gender, tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi terhadap keharmonisan keluarga di Indonesia tahun 2014-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan gender terhadap keharmonisan keluarga di Indonesia pada tahun 2014-2021?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap keharmonisan keluarga di Indonesia pada tahun 2014-2021?
3. Bagaimana pengaruh kesejahteraan ekonomi terhadap keharmonisan keluarga di Indonesia pada tahun 2014-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan gender terhadap keharmonisan keluarga di Indonesia pada tahun 2014-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap keharmonisan keluarga di Indonesia pada tahun 2014-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesejahteraan ekonomi terhadap keharmonisan keluarga di Indonesia pada tahun 2014-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pemahaman peneliti mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG), tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi terhadap

keharmonisan keluarga di Indonesia, serta memberikan pengalaman dalam mengaplikasikan teori ke dalam analisis empiris.

2. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan gender, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat guna mendukung terciptanya keharmonisan keluarga.
3. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan menjadi sumber referensi bagi pembaca yang ingin memahami faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan keluarga, serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Diduga indeks pembangunan gender berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan keluarga di Indonesia tahun 2014-2021.
2. Diduga pendidikan berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan keluarga di Indonesia tahun 2014-2021.
3. Diduga kesejahteraan ekonomi berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga di Indonesia tahun 2014-2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibuat dan terbagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTKA

Tinjauan pustaka terdiri dari teori dan penelitian terdahulu mengenai topik penelitian yang dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari jenis dan sumber data, model dan alat analisis penelitian dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan yaitu membahas hasil dari topik penelitian yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Penutup terdiri dari Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.